

**ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI LAUT  
DALAM PERSPEKTIF INDONESIA SEBAGAI NEGARA MARITIM  
TESIS**

**Oleh:**

**ALIOTH WILEM BELSERAN**

**2102190056**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2023**

**ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI LAUT  
DALAM PERSPEKTIF INDONESIA SEBAGAI NEGARA MARITIM**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar  
Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Hukum  
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

**Oleh:**

**ALIOTH WILEM BELSERAN**

**2102190056**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA**

**2023**



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alioth Wilem Belseran  
NIM : 2102190056  
Program Studi : Program Magister Hukum  
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul: “Asas Kepastian Hukum dalam Penegakan Hukum Di laut dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Maritim.” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan umum, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera didalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan publikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar megister di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera didalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan diatas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 23 Juni 2023



Alioth Wilem Belseran  
NIM: 2102190056



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI LAUT  
DALAM PERSPEKTIF INDONESIA SEBAGAI NEGARA MARITIM

Oleh:

Nama : Alioth Wilem Belseran  
NIM : 2102190056  
Program Studi : Program Magister Hukum  
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam sidang tugas akhir guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.


Jakarta, 23 Juni 2023

Mengetahui,

Pembimbing I


Pembimbing II


  
Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.  
NIDN: 0020096802

  
Dr. Gindo Edward Tobing, S.H., M.H.  
NIDN: 883164001

Ketua  
Program Studi Magister Hukum

Direktur  
Program Pasca Sarjana

  
Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.  
NIDN/NIDK: 141104/032 7096 504

  
Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadjak, M.Pd., PA  
NIDN/NIDK: 001473/0320116402





**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

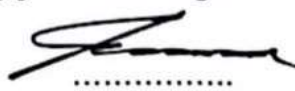


**PERSETUJUAN TIM PENGUJIAN TUGAS AKHIR**

Pada tanggal: 23 Juni 2023 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan Akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Megister Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Alioth Wilem Belseran  
NIM : 2102190056  
Program studi : Program Magister Hukum  
Fakultas : Program Pascasarjana

Termasuk Ujian Tugas Akhir yang berjudul: "Asas Kepastian Hukum dalam Penegakan Hukum Di laut dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Maritim."

Oleh tim Penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda tangan
1. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H	Sebagai Ketua	 .....
2. Dr. Gindo L Tobing, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	 .....
3. Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	 .....



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alioth Wilem Belseran  
NIM : 2102190056  
Fakultas : Program Pascasarjana  
Program studi : Magister Ilmu hukum  
Jenis Tugas Akhir : Tesis  
Judul : "Asas Kepastian Hukum dalam Penegakan Hukum Di laut dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Maritim."

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya, dengan arahan dari Dosen Pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik diperguruan tinggi manapun.
2. Tugas Akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan di cantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Saya memberikan hak noneksklusif tanpa royalti kepada Universitas Kristen Indonesia, yang berhak menyimpan, menggali media / format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di : Jakarta

Tanggal : 23 Juni 2023

Yang menyatakan



Alioth Wilem Belseran

NIM: 2102190056

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus, karena dengan bimbingan-NYA dan tuntunan-NYA dalam kehidupan saya, akhirnya tesis yang berjudul: *“Asas Kepastian Hukum dalam Penegakan Hukum Di laut dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Maritim.”*

Dalam penyelesaian tesis ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, semangat, doa, serta inspirasi kepada:

1. Teristimewa kepada Istri dan Anak-anak tercinta, yang telah memberi dorongan moral, materiil, dan doa yang tidak ada habisnya. Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai.
2. Bapak Dr Dhaniswara K Harjono S.H, M.H, M.B.A. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi bagian dari Civitas Akademik.
3. Ibu Prof. Dr.dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
5. Bapak Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., juga selaku Dosen Pembimbing 1 yang dengan sangat sabar dalam membimbing, menuntun, dan memberikan banyak arahan kepada saya dalam menyelesaikan tesis ini.

6. Bapak Dr. Gindo L Tobing, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 yang dengan sangat sabar dalam membimbing, menuntun, dan memberikan banyak arahan kepada saya dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh staff di Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia, terimakasih atas bantuannya dan pelayanannya selama mengikuti perkuliahan.
9. Rekan-rekan perkuliahan yang selalu memberikan kontribusi dan dukungan positif selama perkuliahan berlangsung.
10. Pihak pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam penulisan tesis ini.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus, nasional dan terkhusus bagi penulis pribadi

Jakarta, 23 Juni 2023

Hormat kami,



Alioth Wilem Belseran  
NIM: 2102190056



## DAFTAR ISI

	<u>Hal.</u>
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR .....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR .....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR .....	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
1. Secara Teoritis .....	12
2. Secara Praktis .....	12
E. Metode Penelitian .....	13
1. Tipe Penelitian .....	13
2. Pendekatan Penelitian .....	13
3. Sifat Penelitian .....	14
4. Data dan Sumber Data .....	14
F. Sistematika Penulisan .....	15

BAB II LANDASAN TEORI .....	17
A. Tinjauan Pustaka Teori Hukum .....	17
1. Teori Negara hukum .....	19
2. Teori kepastian hukum .....	20
B. Tinjauan hukum tentang hukum laut .....	22
1. Indonesia sebagai negara kepulauan .....	22
2. Ruang lingkup hukum laut .....	24
3. Pembatasan kedaulatan Negara atas wilayah laut .....	26
4. Pengaturan kawasan dalam hukum laut .....	30
5. Landas kontinen dalam Negara kepulauan .....	32
C. Penegakan Hukum .....	33
1. Aparatur Penegak Hukum .....	35
2. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum .....	38
3. Pengertian Penegakan Hukum di Laut .....	40
4. Pengertian Kewenangan .....	46
5. Pengertian Aparat Penegak Hukum Di Laut .....	49
6. Daerah Penegakan Hukum Di laut .....	51
BAB III PEMBAHASAN .....	58
Kepastian hukum dalam penegakan hukum di laut .....	58
1. Kementerian Perhubungan/Direktorat Jenderal Perhubungan Laut .....	63
2. Kementerian Keuangan/ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai .....	64
3. Kepolisian Perairan dan Udara (POLAIRUD) .....	65

4. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut .....	65
5. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) .....	66
<b>BAB IV PENEGAKAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF INDONESIA</b>	
<b>SEBAGAI NEGARA MARITIM .....</b>	<b>77</b>
A. Keamanan Maritim dari Aspek Regulasi .....	81
B. Keamanan Maritim dari Aspek Penegakan Hukum .....	92
C. Pembangunan Laut sebagai Pertahanan Laut .....	101
D. Pendirian Coast guard Unit .....	110
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>125</b>
A. Kesimpulan .....	125
B. Saran .....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>128</b>



# ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI LAUT DALAM PERSPEKTIF INDONESIA SEBAGAI NEGARA MARITIM

## ABSTRAK

Oleh: ALIOTH WILEM BELSERAN

NIM: 2102190056

Indonesia sebagai poros maritim dunia memiliki laut sebagai penghubung antar wilayah dan batas dari teritorial negara. Pentingnya fungsi laut menimbulkan perlunya penegakan hukum di laut yang baik untuk mempertahankannya. Namun, penegakan hukum di laut dalam yuridiksi nasional Indonesia belum tertata dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari posisi kewenangan dalam pengaturan terkait keamanan kemaritiman nasional yang saling tumpang tindih antar lembaga seperti Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP). Tulisan ini akan menganalisis lembaga negara yang menjadi coast guard di Indonesia. Selain itu mengenai permasalahan penegakan hukum di laut tidak dapat dilaksanakan dengan baik yang disebabkan oleh ketidak harmonisan antar peraturan perundang-undangan. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang. Dari penulisan ini akan diperoleh hasil mengenai analisis harmonisasi penegakan hukum dan faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum keamanan laut di Indonesia.

**Kata kunci:** Instansi Penegak Hukum Di Laut, Pertahanan, Keamanan, Laut, Coast Guard



**THE PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY IN LAW ENFORCEMENT AT  
THE SEA IN THE PERSPECTIVE OF INDONESIA AS A MARITIME  
COUNTRY**

**ABSTRACT**

by: ALIOTH WILEM BELSERAN

*Indonesia as the world's maritime axis has seas as a link between regions and boundaries of the country's territories. The importance of the function of the sea raises the need for good law enforcement at sea to maintain it. However, law enforcement at sea within Indonesia's national jurisdiction has not been well organized. This can be seen from the position of authority in regulations related to national maritime security which overlap between institutions such as the Indonesian Navy (TNI-AL), the Maritime Security Agency (Bakamla), and the Sea and Coast Guard Unit (KPLP). This paper will analyze the state institutions that are the coast guards in Indonesia. In addition, regarding the problem of law enforcement at sea, it cannot be carried out properly due to disharmony between laws and regulations. This writing uses a normative juridical method that uses a statutory approach. From this writing, results will be obtained regarding the analysis of harmonization of law enforcement and the factors that become obstacles in enforcing maritime security law in Indonesia.*

**Keywords:** *Law Enforcement Agencies at Sea, Defense, Security, Sea, Coast Guard*